

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Penelitian tentang pengaruh aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 membutuhkan kajian teori sebagai berikut :

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) dalam Hakim dan Praptoyo (2015) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Pandangan *agency theory* adalah adanya pemisahan antara pihak *principal* dan *agent* yang menyebabkan munculnya potensi konflik yang dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan.

Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan (Gunawan *et al*, 2015), yaitu: (1) masalah keagenan yang timbul pada saat keinginan atau tujuan dari *principal* dan *agent* berlawanan dan merupakan hal yang sulit bagi *principal* untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh *agent*; (2) masalah pembagian resiko yang timbul pada saat *principal* dan *agent* memiliki sikap yang berbeda terhadap resiko.

Gunawan *et al*, (2015) menyatakan bahwa adanya asumsi yang mengenai sifat dasar manusia: (1) manusia pada umumnya mementingkan

diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi manusia mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Ketiga sifat tersebut menyebabkan informasi yang dihasilkan manusia untuk manusia lain selalu dipertanyakan reliabilitasnya dan informasi yang disampaikan biasanya diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya atau lebih dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau *assymerty informationt*, sehingga hal tersebut memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba.

Asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) memberikan kesempatan kepada manajer untuk bertindak *opportunistic*, yaitu memperoleh keuntungan pribadi. Dalam hal pelaporan keuangan, manajer melakukan manajemen laba (*earnings management*) untuk menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Dengan semakin tingginya asimetri informasi antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*) yang mendorong pada tindakan manajemen laba oleh manajemen akan memicu semakin tingginya biaya keagenan (*agency cost*) dan menunjukkan adanya hubungan positif antara asimetri informasi dengan manajemen laba (Ujiyantho dan Pramuka, 2007).

2. Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Teori akuntansi positif merujuk pada sebuah teori yang mencoba untuk membuat prediksi yang bagus dari kejadian dunia nyata. Teori akuntansi positif berkaitan dengan memprediksi tindakan seperti pilihan kebijakan akuntansi oleh manajer perusahaan dan bagaimana respon manajer terhadap standar akuntansi baru yang diusulkan (Scott, 2014). Berdasarkan teori akuntansi positif ini memunculkan adanya aliran positif dari beberapa ahli.

Aliran positif mendasarkan pada anggapan bahwa kekuasaan dari politik merupakan sesuatu yang tetap dan *system social* dalam organisasi merupakan fenomena empiris konkrit dan bebas dari nilai atau tidak tergantung pada manajer dan karyawan yang bekerja dalam organisasi tersebut (Machintos dalam Chariri dan Ghozali, 2007). Atas dasar ini aliran positif menganggap diri mereka sebagai pengamat yang netral, positif, dan tidak dipengaruhi oleh nilai yang berkaitan dengan fenomena akuntansi yang diamati.

Teori akuntansi positif berusaha untuk menjelaskan fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Dengan kata lain, teori akuntansi positif dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi yang terjadi jika manajer menentukan pilihan tertentu. Penjelasan dan prediksi dalam teori akuntansi positif didasarkan pada proses kontrak atau hubungan keagenan antara manajer dengan kelompok lain seperti investor,

kreditor, auditor, pihak pengelola pasar modal dan institusi pemerintah (Watts dan Zimmerman, 1990).

Teori akuntansi positif mendasarkan pada premis bahwa individu selalu bertindak atas dasar motivasi pribadi (*self-seeking motives*) dan berusaha memaksimalkan keuntungan pribadi. Teori akuntansi positif memiliki fokus ekonomi dan berusaha menjawab pertanyaan seperti (Chariri dan Ghozali, 2007):

- a. Apakah biaya yang dikeluarkan untuk memilih metode akuntansi sesuai dengan manfaat yang diperoleh?
- b. Apakah biaya regulasi dan proses penentuan standar akuntansi sesuai dengan manfaatnya?
- c. Apakah laporan keuangan berpengaruh terhadap harga saham?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, teori akuntansi positif menggunakan asumsi sebagai berikut (Chariri dan Ghozali, 2007):

- a. Manajer, investor, kreditor, dan individu lain bersikap rasional dan berusaha memaksimalkan kepuasan;
- b. Manajer memiliki kebebasan untuk memilih metode akuntansi yang memaksimalkan kepuasan mereka atau mengubah kebijakan produksi, investasi dan pendanaan perusahaan untuk memaksimalkan kepuasan mereka;
- c. Manajer mengambil kebijakan yang memaksimalkan nilai perusahaan.

Positive accounting theory juga dapat dikaitkan dengan fenomena perilaku oportunistik manajer dengan membentuk tiga yang melatarbelakangi perilaku oportunistik manajer tersebut (Watt dan Zimmerman, 1986), yaitu:

a. *Bonus Plan Hypothesis*

Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan bonus besar berdasarkan earnings lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan.

b. *Debt Covenant Hypothesis*

Manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan laba (Sweeney, 1994). Hal ini untuk menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak eksternal.

c. *Political Cost Hypothesis*

Semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Hal tersebut dikarenakan dengan laba yang tinggi pemerintah akan segera mengambil tindakan, misalnya mengenakan peraturan *antitrust*, menaikkan pajak pendapatan perusahaan, dan lain-lain.

Berdasarkan yang melatarbelakangi perilaku oportunistik manajer tersebut, teori akuntansi positif mengakui adanya hubungan antara manajer – investor, manajer – kreditor dan manajer – pemerintah. Beberapa kondisi memungkinkan terjadinya konflik terhadap perilaku oportunistik manajer

itu dan manajer akan menentukan pilihan yang paling tepat bagi diri mereka.

3. Manajemen Laba

a. Definisi Manajemen Laba

Istilah *earnings management* atau manajemen laba merupakan istilah yang sudah biasa didengar, baik oleh praktisi maupun akademisi dari akuntansi dan manajemen. Terdapat beberapa istilah umum yang sering digunakan oleh para praktisi dan kalangan bisnis mengenai manajemen laba, antara lain *creative accounting practices*, *income smoothing*, *income manipulation*, *agressive accounting*, *financial number game*, dan masih banyak istilah lainnya yang dapat digunakan secara bergantian yang kadarnya mulai dari tingkatan sopan sampai pada tingkatan kotor dan membahayakan publik.

Scott (2014) menyatakan bahwa :

“Earnings management is the choice by a manager of accounting policies so as to achieve some specific objective”.

Manajemen laba adalah pilihan atas kebijakan akuntansi yang dilakukan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu.

Healy, Wahlen (1999) mendefinisikan manajemen laba sebagai berikut:

“Earnings management occurs when managers use judgment in financial reporting and in structuring transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders about the underlying economic performance of the company or to influence contractual outcomes that depend on reported accounting numbers.”

Definisi di atas menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan kebijakan dalam pelaporan keuangan dan dalam menyusun transaksi untuk mengubah laporan keuangan dan menyesatkan *stakeholders* mengenai kinerja ekonomi perusahaan, atau untuk mempengaruhi *contractual outcomes* yang tergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan.

Sulistiawan *et al* (2011) menyatakan bahwa *creative accounting* dan *earning management* (manajemen laba) adalah dua istilah yang dianggap merupakan satu jenis aktivitas yang sama. *Creative accounting* adalah aktivitas badan usaha memanfaatkan teknik dan kebijakan akuntansi guna mendapatkan hasil yang diinginkan.

Manfaat manajemen laba tergantung dari tujuan digunakannya apakah untuk mencapai hubungan kontrak tepat guna (*efficient contracting*) atau untuk tujuan menggunakan kesempatan (*opportunistic*) (Scott, 2014). Apabila manajemen laba digunakan untuk tujuan *efficient contracting*, maka dapat dikatakan manajemen laba adalah sesuatu hal yang baik. Sebaliknya, apabila digunakan untuk tujuan *opportunistic* maka manajemen laba dapat dikatakan buruk.

Dari beberapa pengertian manajemen laba di atas, penulis menyimpulkan bahwa manajemen laba lebih banyak berkaitan dengan pengambilan keputusan manajemen terkait laporan keuangan perusahaan. Banyak cara yang dapat ditempuh oleh manajemen untuk mempengaruhi pelaporan keuangan. Salah satu contoh, manajer dapat

memilih diantara beberapa metode akuntansi untuk satu kegiatan ekonomi yang sama, seperti menggunakan metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun, LIFO, FIFO atau rata-rata tertimbang. Pemilihan dari salah satu metode tersebut tentu akan berpengaruh terhadap laporan keuangan khususnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan.

b. Motivasi Manajemen Laba

Perusahaan yang melakukan manajemen laba menggunakan angka-angka yang dilaporkan untuk membangun opini di lingkungan perusahaan. Laba bersih menjadi angka yang memperoleh banyak perhatian. Maka angka ini yang paling mungkin dimanipulasi oleh para manajer. Sulistiawan, *et al.* (2011) mengemukakan bahwa secara umum terdapat beberapa hal yang memotivasi individu atau badan usaha melakukan tindakan *creative accounting*, yaitu:

1) Motivasi Bonus

Dalam sebuah perjanjian bisnis, pemegang saham akan memberikan sejumlah insentif dan bonus sebagai *feedback* atau evaluasi atas kinerja manajer dalam menjalankan operasional perusahaan. Insentif ini diberikan dalam jumlah relatif tetap dan rutin. Sementara, bonus yang relatif lebih besar nilainya hanya akan diberikan ketika kinerja manajer berada di area pencapaian bonus yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Kinerja manajer salah satunya diukur dari pencapaian laba usaha. Pengukuran kinerja

berdasarkan laba dan skema bonus tersebut memotivasi para manajer untuk memberikan performa terbaiknya sehingga tidak menutup peluang mereka melakukan tindakan manajemen laba agar dapat menampilkan kinerja yang baik demi mendapatkan bonus yang maksimal.

2) Motivasi Utang

Selain melakukan kontrak bisnis dengan pemegang saham, untuk kepentingan ekspansi perusahaan, manajer seringkali melakukan beberapa kontrak bisnis dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah kreditor. Agar kreditor mau menginvestasikan dananya di perusahaannya, tentunya manajer harus menunjukkan performa yang baik dari perusahaannya. Dan untuk memperoleh hasil maksimal, yaitu pinjaman dalam jumlah besar, perilaku kreatif dari manajer untuk menampilkan performa yang baik dari laporan keuangannya pun seringkali muncul.

3) Motivasi Pajak

Tindakan manajemen laba tidak hanya terjadi pada perusahaan *go public* dan selalu untuk kepentingan harga saham, tetapi juga untuk kepentingan perpajakan. Kepentingan ini didominasi oleh perusahaan yang belum *go public*. Perusahaan yang belum *go public* cenderung melaporkan dan menginginkan untuk menyajikan laporan laba fiskal yang lebih rendah dari nilai yang sebenarnya. Kecenderungan ini memotivasi manajer untuk bertindak kreatif

melakukan tindakan manajemen laba agar seolah-olah laba fiskal yang dilaporkan memang lebih rendah tanpa melanggar aturan dan kebijakan akuntansi perpajakan.

4) Motivasi Penjualan Saham

Motivasi ini banyak digunakan oleh perusahaan yang akan *go public* ataupun sudah *go public*. Perusahaan yang akan *go public* akan melakukan penawaran saham perdananya ke publik atau lebih dikenal dengan istilah *Initial Public Offering* (IPO) untuk memperoleh tambahan modal usaha dari calon investor. Begitupun dengan perusahaan yang sudah *go public* untuk kelanjutan dan ekspansi usahanya.

5) Motivasi Pergantian Direksi

Praktik manajemen laba biasanya terjadi pada sekitar periode pergantian direksi atau *chief executive officer* (CEO). Menjelang berakhirnya masa jabatan, direksi cenderung bertindak kreatif dengan memaksimalkan laba agar performa kerjanya tetap terlihat baik pada tahun terakhir menjabat. Motivasi utama yang mendorong hal tersebut adalah untuk memperoleh bonus yang maksimal pada akhir masa jabatannya.

6) Motivasi Politis

Motivasi ini biasanya terjadi pada perusahaan besar yang bidang usahanya banyak menyentuh masyarakat luas, seperti perusahaan-perusahaan strategis perminyakan, gas, listrik, dan air.

Demi menjaga tetap mendapatkan subsidi, perusahaan-perusahaan tersebut cenderung menjaga posisi keuangannya dalam keadaan tertentu sehingga prestasi atau kinerjanya tidak terlalu baik karena jika sudah baik, kemungkinan besar subsidi tidak lagi diberikan.

c. Pola Umum Manajemen Laba

Dengan semua insentif untuk melakukan manajemen laba, maka bukanlah suatu yang mengherankan apabila sering kali para manajer menggunakan fleksibilitas yang terkandung di dalam akuntansi akrual agar benar-benar mampu mengatur labanya. Semakin banyak orang yang mendapatkan pengetahuan atau pelatihan akuntansi, semakin mudah bagi orang tersebut untuk melihat estimasi atau pertimbangan akuntansi yang dapat digunakan untuk menaikkan laba yang dilaporkan.

Pola manajemen laba sebagaimana dikemukakan oleh Scott (2003), yaitu:

- 1) *Taking a bath*: Hal ini dapat terjadi selama periode reorganisasi, termasuk pengangkatan *Chief Executive Officer* (CEO) baru. Jika perusahaan memang sedang dalam kondisi rugi, maka manajemen akan membebankan biaya-biaya yang seharusnya ditangguhkan atau dapat ditangguhkan agar tidak mengganggu laba di masa mendatang.
- 2) *Income minimization*: Skenario ini mirip *taking a bath* tetapi lebih halus. Skenario ini sengaja memilih alternatif akuntansi atau

manipulasi yang akan menghasilkan laba lebih rendah, misalnya metode akuntansi persediaan dipilih *Last In First Out* (LIFO), metode penyusutan dipilih *double declining* atau *sum of the years digit*, membebankan biaya fiktif.

3) *Income maximization*: Untuk mendapatkan bonus yang lebih besar atau menghindari pelanggaran *debt covenants* perusahaan melakukan skenario yang dapat memperbesar laba. Kebalikan dari *Income minimization* maka skenario ini memilih metode atau melakukan manipulasi yang dapat memperbesar laba, misalnya memilih *First In First Out* (FIFO), mengakui pendapatan lebih cepat daripada seharusnya.

4) *Income smoothing*: Tidak seperti skenario di atas, pada skenario ini perusahaan justru berusaha agar laba yang dicapai dari tahun ke tahun berada pada level yang stabil.

d. Teknik Manajemen Laba

Teknik manajemen laba sangat beragam. Mulai dari teknik legal yang diperbolehkan dalam SAK sampai teknik ilegal yang bertentangan dan tidak diperbolehkan dalam SAK. Secara umum, teknik legal yang biasanya dijumpai dalam praktik manajemen laba dapat dikelompokkan ke dalam lima teknik (Sulistiawan, *et al.*, 2011), yaitu:

1) Mengubah Metode Akuntansi

Metode akuntansi merupakan pilihan-pilihan yang disediakan oleh standar akuntansi (*accounting choice*) dalam menilai aset perusahaan. Beberapa bentuk pilihan metode akuntansi antara lain seperti metode penilaian persediaan *First In First Out*-FIFO, *Last In First Out* -LIFO, rata-rata tertimbang, atau identifikasi khusus. Selain itu, masih banyak metode pilihan yang lain seperti leasing (*capital lease atau operating lease*), penggunaan metode harga pasar atau nilai buku pada aset jangka panjang, dan lain-lain.

Sebagai contoh, dalam hal pemilihan metode akuntansi untuk penilaian perusahaan, seperti FIFO atau LIFO, bagi pemilik perusahaan akan menguntungkan dalam aspek pajak ketika memilih untuk menggunakan metode LIFO, karena penilaian persediaan dengan metode LIFO akan menekan jumlah arus kas keluar untuk pembayaran pajak. Namun, LIFO tidak diperkenankan dalam aturan perpajakan di Indonesia, meskipun dalam akuntansi komersial hal ini diperkenankan.

2) Membuat Estimasi Akuntansi

Teknik ini dilakukan dengan tujuan mempengaruhi laba akuntansi melalui kebijakan dalam membuat estimasi akuntansi. Beberapa bentuk estimasi akuntansi tersebut yaitu estimasi dalam menentukan umur ekonomis aset, baik aset tetap maupun aset berwujud, estimasi dalam menentukan besarnya jumlah piutang tidak

tertagih, baik dengan persentase penjualan maupun persentase piutang, dan lain-lain.

Salah satu contoh manajemen laba yaitu cara untuk mendapatkan tambahan atau pengurangan laba adalah dengan mengubah estimasi akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi ini disesuaikan dengan kebutuhan penyajian laporan keuangan. Jika mengharapkan kenaikan laba, perusahaan dapat mengubah estimasi aset tetap atau aset tidak berwujudnya menjadi lebih panjang. Hasilnya, laba menjadi lebih tinggi karena biaya penyusutan menurun.

3) Mengubah Periode Pengakuan Pendapatan dan Biaya

Teknik ini dilakukan untuk mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan dan biaya dengan cara menggeser pendapatan dan biaya keperiode berikutnya agar memperoleh biaya maksimum. Teknik ini biasanya ditemukan pada perusahaan yang akan melakukan IPO.

4) Mengklasifikasikan Akun *Current* dan *Noncurrent*

Pada bagian ini, permainan akuntansi dilakukan dengan memindahkan posisi akun dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi, sebenarnya laporan keuangan yang disajikan sudah sama, tetapi karena kelihaihan penyajinya, laporan keuangan ini bias memberikan dampak interpretasi yang berbeda bagi penggunanya.

5) Mereklasifikasi AkruaI Diskresioner (*Accrual Discretionary*) dan AkruaI Nondiskresioner (*Accrual Nondiscretionary*)

AkruaI diskresioner adalah akruaI yang dapat berubah sesuai dengan kebijakan manajemen, seperti pertimbangan tentang penentuan umur ekonomis aset tetap atau pertimbangan pemilihan metode depresiasi. Sedangkan, akruaI nondiskresioner adalah akruaI yang dapat berubah bukan karena kebijakan atau pertimbangan pihak manajemen, seperti perubahan piutang yang besar karena adanya tambahan penjualan secara signifikan.

AkruaI adalah penjumlahan antara akruaI diskresioner dan akruaI nondiskresioner. AkruaI merupakan perbedaan laba dengan arus kas operasi. Makin besar perbedaannya, maka perbedaan itu disebabkan karena aspek akruaI atau kebijakan akuntansi, sedangkan arus kas operasional hanya berasal dari transaksi kas riil. Makin tinggi nilai akruaI menunjukkan adanya strategi menaikkan laba dan makin minus nilai akruaI menunjukkan adanya strategi menurunkan laba.

e. Deteksi Manajemen Laba

Praktik manajemen laba adalah suatu hal yang penting diketahui oleh para pengguna laporan keuangan, terutama analis keuangan, investor, dan kreditor. Dengan berbagai alternatif metodologi yang ada, peningkatan ataupun penurunan laba yang terjadi pada proses manajemen laba dapat diketahui dengan berbagai metode.

Secara umum, untuk mendeteksi manajemen laba digunakan dua pendekatan (Sulistiawan, *et al.*, 2011), yaitu:

1) Deteksi Manajemen Laba secara Kualitatif

Sulistiawan, *et al.* (2011) menyatakan bahwa untuk mendeteksi praktik manajemen laba, analisis akuntansi bisa dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi kebijakan akuntansi utama yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau industri.
- b) Menilai penggunaan fleksibilitas akuntansi perusahaan, yaitu seberapa fleksibel perusahaan menerapkan kebijakan akuntansinya.
- c) Menilai strategi yang dijalankan perusahaan, yaitu sejauh manakah perbedaan kebijakan akuntansi perusahaan yang sedang dijalankan dengan kebijakan akuntansi perusahaan lain.
- d) Menilai kualitas pengungkapan perusahaan, yaitu dengan menilai apakah perusahaan telah menyediakan informasi yang memadai untuk menilai strategi dan memahami kondisi ekonomi dari kegiatan operasinya.
- e) Mengidentifikasi adanya potensi permasalahan akuntansi (*potential red flag*). Potensi permasalahan akuntansi dapat diidentifikasi dari hal-hal seperti adanya penghapusan aset (*writedowns*) aset dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau tidak terduga, adanya opini audit yang *qualified* atau adanya perubahan auditor, adanya transaksi-transaksi yang banyak berkaitan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, dan lain-lain.

2) Deteksi Manajemen Laba secara Kuantitatif

Sulistiawan, *et al.* (2011) menjelaskan bahwa secara umum manajemen laba dibagi menjadi dua kategori, yaitu manajemen laba melalui kebijakan akuntansi dan manajemen laba melalui aktivitas riil. Manajemen laba melalui kebijakan akuntansi merujuk pada permainan angka laba yang dilakukan dengan menggunakan teknik dan kebijakan akuntansi. Sementara, manajemen laba melalui aktivitas riil menunjuk pada permainan angka laba yang dilakukan melalui aktivitas-aktivitas yang berasal dari kegiatan bisnis normal atau yang berhubungan dengan kegiatan operasional, misalnya menunda kegiatan promosi produk atau mempercepat penjualan dengan pemberian diskon besar-besaran.

a) Deteksi Manajemen Laba melalui Kebijakan Akuntansi

Pada deteksi ini, yang digunakan adalah model-model deteksi manajemen laba yang banyak digunakan dalam riset empiris. Model-model tersebut diantaranya adalah *Jones Model* (1991), *Modified Jones Model* (1995), *Kasznik Model* (1999), dan *Performance-Matched Discretionary Accruals Model* yang dikemukakan oleh Kothari dan kawan-kawan (2005). Secara umum semua model tersebut menggunakan akrual sebagai dasar dalam menghitung manajemen laba yang terjadi.

b) Deteksi Manajemen Laba dari Aktivitas Riil

Sulistiawan, *et al.* (2011) menyatakan bahwa praktik manajemen riil dapat dilakukan dengan menggunakan tiga metode, yaitu:

- (1) Memanipulasi penjualan atau meningkatkan penjualan secara tidak wajar (*sales manipulation*). Cara ini dilakukan dengan menawarkan diskon harga atau syarat kredit yang ringan. Akibatnya, manajemen perusahaan dapat meningkatkan penjualan selama tahun berjalan sehingga akan meningkatkan nilai laba kotornya. Namun, peningkatan volume penjualan ini akan hilang ketika harga jual kembali ke harga awal.
- (2) Mengurangi pengeluaran diskresioner. Pengeluaran diskresioner seperti biaya riset dan pengembangan, biaya iklan, dan biaya pemeliharaan dibebankan pada periode terjadinya. Dengan begitu, perusahaan dapat mengurangi biaya yang dilaporkan dan meningkatkan laba dengan mengurangi pengeluaran diskresioner. Pada proses pergantian direksi atau pimpinan perusahaan, pengelola lama cenderung menunda atau mengurangi pengeluaran diskresioner untuk mendapatkan bonus dari penyajian laba yang besar pada tahunnya.
- (3) Produski yang berlebihan (*overproduction*). Agar laba naik, manajer memproduksi lebih banyak persediaan dari yang sewajarnya untuk memenuhi permintaan. Dengan tingkat

produksi yang lebih tinggi, biaya *overhead* tetap per unit makin kecil sehingga biaya per unitnya akan turun. Hal ini membuat biaya barang terjual lebih rendah sehingga perusahaan mendapat keuntungan operasi yang lebih baik. Namun akibatnya, persediaan barang perusahaan di apsar menjadi besar dan akan berimbas pada permintaan barang pada masa mendatang.

Sulistiawan, *et al.* (2011), pendekatan adanya praktik manajemen laba riil apat dilakukan dengan dua model, yaitu aliran kas operasi abnormal dan biaya produksi abnormal.

4. Metode Perhitungan Manajemen Laba

Dalam Akuntansi dikenal dengan istilah basis akrual dan basis kas. Pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan akrual. Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi berbasis kas. Akrual adalah suatu metode perhitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terhutang (Mulyono, 2012). Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekuitas (Elingga, 2008). Akrual tidak tergantung kapan penghasilan diterima dan kapan biaya dilunasi. Dengan pendekatan ini, mengakui pendapatan ketika dihasilkan dan mengakui beban pada periode terjadinya, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran kas. Menurut PSAK (2013), laporan keuangan disusun berdasarkan akrual. Dengan dasar ini,

pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

5. Pajak Tangguhan

Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (*payable*) atau terpulihkan (*recoverable*) pada tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kompensasi kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak pada berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan (Waluyo, 2008).

Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak PPh di masa yang akan datang disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang (*tax los carry forward*) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu.

Dampak PPh di masa yang akan datang yang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, baik neraca maupun laba rugi. Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa datang. Atau sebaliknya, bisa saja perusahaan membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa datang.

Menurut Sukrisno (2008) perbedaan temporer dimaksudkan sebagai perbedaan antara dasar pengenaan pajak (*tax base*) dari suatu aset atau kewajiban dengan nilai tercatat pada aset atau kewajiban yang berakibat pada perubahan laba fiskal periode mendatang. Terjadinya perubahan tersebut dapat bertambah (*future taxable amount*) pada saat aset dipulihkan atau kewajiban dilunasi/dibayar. Perbedaan temporer ini berakibat harus diakuiinya aset dan atau kewajiban pajak tangguhan.

Dengan berlakunya PSAK No.46 timbul kewajiban bagi perusahaan untuk menghitung dan mengakui pajak tangguhan (*deffered taxed*) atau efek pajak masa depan (*future tax effects*) dengan menggunakan pendekatan metode aset dan kewajiban (*the assets and liability*), yang berbeda dengan pendekatan metode kewajiban laporan laba rugi (*income statement liability method*) yang sebelumnya lazim digunakan oleh perusahaan dalam menghitung pajak tangguhan (Moh.Zain, 2007).

Pajak tangguhan dibedakan menjadi aktiva (kewajiban) pajak tangguhan (*deferred tax assets*) dan beban (manfaat) pajak tangguhan (*deffered tax expense*). Menurut PSAK 46, aktiva pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan (*recoverable*) pada tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Jika laba pajak lebih besar dibandingkan dengan laba komersial, maka selisih tersebut diakui sebagai “Aset Pajak Tangguhan” (*Deferred Tax Asset*), sebesar selisih tersebut

dikalikan tarif efektif PPh, yang nantinya bisa dikreditkan (dijadikan pengurang) di tahun fiskal berikutnya.

Disisi lain terdapat beban pajak tangguhan (*Deferred Tax Expense*) yang merupakan jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk tahun mendatang sebagai akibat dari adanya perbedaan temporer kena pajak. Jika laba pajak lebih kecil dibandingkan dengan laba komersial, maka selisih tersebut diakui sebagai “Beban Pajak Tangguhan” (*Deferred Tax Expense*), sebesar selisih tersebut dikalikan tarif efektif PPh, yang nantinya dihapuskan ketika bisa dipulihkan di masa depan (Hakim dan Praptoyo, 2015)

6. Aset Pajak Tangguhan

Menurut Waluyo (2008), Aset pajak tangguhan disebabkan jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sisa kompensasi kerugian yang belum dikompensasikan dan kredit pajak yang masih bisa dimanfaatkan. Besarnya aset pajak tangguhan dicatat apabila dimungkinkan adanya realisasi manfaat pajak di masa yang akan datang. Oleh karena itu dibutuhkan *judgement* untuk menaksirkan seberapa mungkin aset pajak tangguhan tersebut dapat terealisasi.

Menurut Suranggane (2007), dengan adanya kewajiban untuk melakukan peninjauan kembali pada tanggal neraca, maka setiap tahun manajemen harus membuat suatu penilaian untuk menentukan saldo aset pajak tangguhan dan pencadangan aset pajak tangguhan, dan sedangkan

penilaian manajemen untuk menentukan saldo cadangan aset pajak tangguhan tersebut bersifat subjektif.

Dengan diberlakukannya PSAK No.46 yang mensyaratkan para manajer untuk mengakui dan menilai kembali aset pajak tangguhan yang dapat disebut pencadangan nilai aset pajak tangguhan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2013), aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba yang dimaksud peraturan ini dapat memberikan kebebasan pada para manajer untuk menentukan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian aset pajak tangguhan pada laporan keuangannya, sehingga aset pajak tangguhan dapat digunakan untuk mengindikasikan ada tindakan manajemen laba yang dilakukan perusahaan dalam laporan keuangan yang dilaporkan (Widiastuti dan Chusniah, 2011).

7. Beban Pajak Tangguhan

Menurut Wijayanti (2006) mengungkapkan bahwa perbedaan temporer yang dapat menambah jumlah pajak di masa depan akan diakui sebagai kewajiban (utang) pajak tangguhan dan perusahaan harus mengakui adanya beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*). Sedangkan menurut Wibowo (2015), pengertian Beban Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Expense*) adalah Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang untuk periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*).

Perbedaan temporer timbul sebagai konsekuensi logis dari adanya perbedaan standar atau ketentuan yang berkaitan dengan pengakuan (kriteria dan periode), dan pengukuran atau penilaian elemen-elemen laporan keuangan yang berlaku dalam disiplin akuntansi perpajakan (ketentuan perpajakan) disatu pihak dengan standar atau ketentuan yang berlaku dalam disiplin akuntansi keuangan dipihak yang lain.

Semakin besar persentase beban pajak tangguhan terhadap total beban pajak perusahaan menunjukkan standar akuntansi yang semakin liberal (Yulianti, 2005). Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal memiliki hubungan positif dengan insentif pelaporan keuangan seperti *financial distress* dan pemberian bonus, dengan adanya hal tersebut maka dimungkinkan manajer dapat melakukan rekayasa laba atau *earnings management* dengan memperbesar jumlah beban pajak tangguhan yang diakui dengan laporan laba rugi (Anasta, 2015).

Menurut Purba (2009) mengatakan penyebab perbedaan beban pajak penghasilan dengan PPh terhutang dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok :

- a. Perbedaan permanen atau tetap Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak sedangkan menurut komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan antara laba fiskal dengan laba komersial secara permanen.

b. Perbedaan Temporer atau waktu Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode sekarang, misalnya

- 1) Metode penyusutan yang diakui fiskal adalah saldo menurun dan garis lurus.
- 2) Metode penilaian persediaan, yang diakui fiskal adalah FIFO dan rata-rata
- 3) Penyisihan piutang tak tertagih, yang diakui fiskal kecuali untuk perusahaan pertambangan, Leasing, Perbankan dan Asuransi.
- 4) Rugi laba selisih kurs, yang diakui fiskal adalah kurs dari menteri perekonomian sedangkan yang diakui oleh akuntansi adalah kurs dari Bank Indonesia.

8. Leverage

Leverage merupakan hutang sumber dana yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya. Tingkat *leverage* dapat diketahui dengan cara membandingkan total hutang dengan total aset. Menurut Nugroho (2011) Rasio *leverage* merupakan rasio yang terdapat pada laporan keuangan yang dapat mengetahui seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal, atau dapat juga menunjukkan beberapa bagian aktiva yang digunakan untuk menjamin hutang. Dengan demikian *leverage* menunjukkan resiko yang dihadapi perusahaan berkaitan dengan hutang yang dimiliki perusahaan. *Leverage* yang semakin besar menunjukkan

resiko investasi yang semakin besar pula sedangkan perusahaan yang mempunyai rasio *leverage* yang rendah berarti mempunyai risiko yang lebih kecil.

Menurut Van Horne (1997) dalam Analisa (2013) dengan tingginya rasio *leverage* menunjukkan bahwa perusahaan tidak *solvable*, artinya total hutangnya lebih besar dibandingkan total asetnya. Karena *leverage* menghitung seberapa besar dana yang disediakan oleh kreditur, juga sebagai rasio yang membandingkan total hutang terhadap keseluruhan aset suatu perusahaan, maka apabila investor melihat aset suatu perusahaan yang tinggi namun risiko *leveragenya* juga tinggi, maka akan berpikir dua kali untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut karena dikhawatirkan aset yang tinggi tersebut diperoleh dari hutang yang akan meningkatkan risiko investasi apabila perusahaan tidak dapat melunasi kewajibannya tepat waktu.

Leverage mempunyai hubungan dengan praktik manajemen laba, ketika perusahaan mempunyai rasio *leverage* yang tinggi maka perusahaan cenderung akan melakukan praktik manajemen laba karena perusahaan terancam tidak bisa memenuhi kewajibannya dengan membayar hutangnya tepat waktu.

9. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar dan kecilnya perusahaan dengan berbagai cara, antara lain total aktiva, *log size*, nilai pasar saham (Azlina, 2010). Karena semakin besar

total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan, ketiga variabel tersebut digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar (ukuran) perusahaan (Sudarmaji dan Sularto, 2007). Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*) (Suwito dan Herawati, 2005).

Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Bagi investor, kebijakan perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek arus kas dimasa yang akan datang. Sedangkan bagi regulator atau pemerintah akan berdampak terhadap besarnya pajak yang akan diterima, serta efektivitas peran pemberian perlindungan terhadap masyarakat secara umum. (Muliati, 2011).

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan. Perusahaan besar cenderung akan memerlukan dana yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Tambahan dana tersebut bisa diperoleh dari penerbitan saham baru atau penambahan hutang. Motivasi untuk mendapatkan dana tersebut akan mendorong pihak manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba, sehingga dengan pelaporan laba yang tinggi maka calon investor

maupun kreditur akan tertarik untuk menanamkan dananya (Agustia, 2013).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang berupaya untuk mendeteksi manajemen laba di perusahaan dengan menggunakan faktor pajak maupun non-pajak. Penelitian mengenai manajemen laba telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti tetapi hasilnya masih belum konsisten. Termasuk penelitian yang menghubungkan aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, *leverage* dan ukuran perusahaan dengan manajemen laba, hasilnya masih berbeda-beda. Berikut adalah uraian beberapa penelitian terdahulu mengenai praktik manajemen laba.

Suranggane (2007) menguji aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba membuktikan bahwa aset pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Herdawati (2015) menemukan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Gunawan *et al* (2015) menguji Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan *Leverage* Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) bahwa dapat disimpulkan variabel - variabel seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu manajemen laba.

Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Erista dan Wibowo (2013) selama tahun 2009-2012 menguji pengaruh aset pajak tangguhan dan beban

pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Hasil pengujian Erista dan Wibowo (2013) terhadap 96 perusahaan menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan yang mampu memprediksi secara signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan variabel aset pajak tangguhan tidak berpengaruh. Suhartanto (2015) menguji Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Kepemilikan Publik, Perubahan Harga Saham Dan Risiko Bisnis Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Publik Sektor Keuangan. Hasil Suhartanto (2015) membuktikan bahwa variabel ROA, *leverage*, kepemilikan publik dan perubahan harga saham tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik perataan laba. Sedangkan untuk variabel ukuran perusahaan, NPM dan risiko bisnis berpengaruh secara signifikan terhadap praktik perataan laba.

Hakim dan Praptoyo (2015) menguji Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Aktiva pajak tangguhan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap manajemen laba dan Beban pajak tangguhan juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap manajemen laba. Rice (2013) menguji Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dan Nilai Perusahaan Terhadap Tindakan Manajemen Laba bahwa dapat disimpulkan variabel *Leverage*, Kepemilikan Institusional, dan Nilai Perusahaan berpengaruh positif, hanya Ukuran Perusahaan yang berpengaruh signifikan negatif terhadap praktek manajemen laba.

Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Widiastuti dan Chusniah (2011) menguji pengaruh aset pajak tangguhan membuktikan bahwa aktiva

pajak tangguhan (APT) berpengaruh positif signifikan terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba (ML). Ulfah (2013) menguji pengaruh beban pajak tangguhan membuktikan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif melakukan manajemen laba. Fatmawati dan Djajanti (2012) menguji Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan *Financial Leverage* Terhadap Praktik Perataan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian Fatmawati dan Djajanti (2012) bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *financial leverage* berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Herdawati (2015)	Variabel Independen: Perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan Variabel Dependen: Manajemen Laba	Analisis Regresi Logistik	1. Perencanaan tidak signifikan terhadap manajemen laba dan 2. Beban pajak tangguhan tidak signifikan terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba
2	Arif Rachmad Hakim dan Sugeng Praptoyo (2015)	Variabel Independen: Aktiva pajak tangguhan, Beban ajak tangguhan Variabel Dependen: Manajemen laba	Analisis Regresi Berganda	1. Aktiva pajak tangguhan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap manajemen laba 2. Beban pajak tangguhan memiliki pengaruh positif yang

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				signifikan terhadap manajemen laba.
3	Gunawan et al (2015)	Variabel Independen: Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan <i>leverage</i> Variabel Dependen: Manajemen Laba	Analisis regresi berganda.	Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan <i>leverage</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu manajemen laba.
4	Suhartanto (2015)	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Publik, Perubahan Harga Saham Dan Risiko Bisnis Variabel Dependen: Manajemen Laba	Analisis Regresi Logistik	Variabel ROA, <i>leverage</i> , kepemilikan publik dan perubahan harga saham tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik perataan laba. Sedangkan untuk variabel ukuran perusahaan, NPM dan risiko bisnis berpengaruh secara signifikan terhadap praktik perataan laba.
5	Nenci Erista dan Hardiyanto Wibowo (2013)	Variabel Independen: Aktiva Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Akrua Variabel Dependen: Manajemen Laba	Analisis Regresi Logistik	Beban pajak tangguhan dan akrua yang mampu memprediksi secara signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan variabel aktiva pajak tangguhan tidak berpengaruh.
6	Yana Ulfah (2013)	Variabel Independen:	Analisis Regresi Linier Sederhana	1. Beban pajak tangguhan

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		<p>Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak</p> <p>Variabel Dependen: Manajemen Laba</p>		<p>berpengaruh positif artinya setiap kenaikan beban pajak tangguhan, maka probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba akan mengalami peningkatan</p> <p>2. Perencanaan pajak memiliki pengaruh positif, semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan manajemen laba.</p>
7	Rice (2013)	<p>Variabel Independen: <i>Leverage</i>, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dan Nilai Perusahaan</p> <p>Variabel Dependen: Manajemen Laba</p>	Analisis regresi linier berganda	<p><i>Leverage</i>, Kepemilikan Institusional, dan Nilai Perusahaan berpengaruh positif, hanya Ukuran Perusahaan yang berpengaruh signifikan negatif terhadap praktek manajemen laba.</p>
8	Fatmawati dan Djajanti (2012)	<p>Variabel Independen: Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan <i>financial leverage</i></p> <p>Variabel Dependen:</p>	Analisis Regresi Logistik	<p>Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan <i>financial leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba.</p>

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		Perataan laba.		
9	Ni Putu Eka Widiastuti dan Elsa Chusniah (2011)	Variabel Independen: Aktiva Pajak Tangguhan Dan <i>Discretionary Accrual</i> Variabel Dependen: Manajemen Laba	Analisis Regresi Logistik	Aktiva pajak tangguhan (APT) dan <i>discretionary accrual</i> (DA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba (ML)
10	Zulaikha Suranggane (2007)	Variabel Independen: Aktiva Pajak Tangguhan Dan Akrua Variabel Dependen: Manajemen Laba	Analisis Regresi Logistik	Variabel akrual (<i>discretionary accrual</i>) saja yang memiliki pengaruh signifikan pada terjadinya manajemen laba sedangkan cadangan aktiva pajak tangguhan tidak berpengaruh.

Sumber : *EconoSains, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, KOMPARTEMEN, Simposium Nasional Akuntansi XIII, Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, dan Jurnal Ekonomi Bisnis.*

Penelitian ini mengacu dari penelitian terdahulu yaitu Hakim dan Praptoyo (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel independen, objek penelitian dan tahun penelitiannya. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan variabel independen *leverage* dan ukuran perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan objek penelitian

perusahaan manufaktur. Begitu juga tahun penelitian ini periode terbaru yaitu dari tahun 2012-2015.

C. Kerangka Pemikiran

Manajemen laba merupakan pemilihan metode oleh manajer dalam mengelola laba dalam suatu perusahaan. Adapun hal-hal yang mempengaruhi terjadinya manajemen laba dalam suatu perusahaan. Diantaranya aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, *leverage* dan ukuran perusahaan.

Menurut Waluyo (2008), Aset pajak tangguhan disebabkan jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sisa kompensasi kerugian yang belum dikompensasikan dan kredit pajak yang masih bisa dimanfaatkan. Besarnya aset pajak tangguhan dicatat apabila dimungkinkan adanya realisasi manfaat pajak di masa yang akan datang. Oleh karena itu dibutuhkan *judgement* untuk menaksirkan seberapa mungkin aset pajak tangguhan tersebut dapat terealisasi.

Dengan diberlakukannya PSAK No.46 yang mensyaratkan para manajer untuk mengakui dan menilai kembali aset pajak tangguhan yang dapat disebut pencadangan nilai aset pajak tangguhan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2013), aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba yang dimaksud peraturan ini dapat memberikan

kebebasan pada para manajer untuk menentukan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian aset pajak tangguhan pada laporan keuangannya, sehingga aset pajak tangguhan dapat digunakan untuk mengindikasikan ada tindakan manajemen laba yang dilakukan perusahaan dalam laporan keuangan yang dilaporkan (Widiastuti dan Chusniah, 2011).

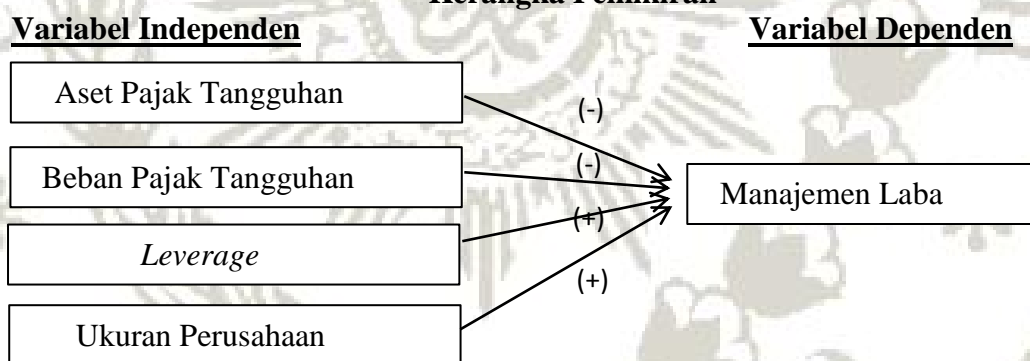
Menurut Wijayanti (2006) mengungkapkan bahwa perbedaan temporer yang dapat menambah jumlah pajak di masa depan akan diakui sebagai kewajiban (utang) pajak tangguhan dan perusahaan harus mengakui adanya beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*). Perbedaan temporer timbul sebagai konsekuensi logis dari adanya perbedaan standar atau ketentuan yang berkaitan dengan pengakuan (kriteria dan periode), dan pengukuran atau penilaian elemen-elemen laporan keuangan yang berlaku dalam disiplin akuntansi perpajakan (ketentuan perpajakan) disatu pihak dengan standar atau ketentuan yang berlaku dalam disiplin akuntansi keuangan dipihak yang lain.

Semakin besar persentase beban pajak tangguhan terhadap total beban pajak perusahaan menunjukkan standar akuntansi yang semakin liberal karena bisa memungkinkan perusahaan tersebut melakukan tindakan memanipulasi laporan keuangannya dengan cara praktik manajemen laba (Yulianti, 2004). Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal memiliki hubungan dengan insentif pelaporan keuangan seperti *financial distress* dan pemberian bonus, dengan adanya hal tersebut maka dimungkinkan manajer dapat melakukan rekayasa laba atau *earnings management* dengan jumlah beban pajak tangguhan yang diakui di laporan laba rugi. Beban pajak

tanggungan yang dihasilkan semakin tinggi maka menandakan tingkat laba perusahaan akan lebih kecil (Anasta, 2015).

Menurut Nugroho (2011) dan Rice (2013), *leverage* dapat mempengaruhi praktik manajemen laba, ketika perusahaan mempunyai rasio *leverage* yang tinggi maka perusahaan cenderung akan melakukan praktik manajemen laba karena perusahaan terancam tidak bisa memenuhi kewajibannya dengan membayar hutangnya tepat waktu. Menurut Azlina (2010) dan Gunawan *et al* (2015), ukuran perusahaan juga berpengaruh terhadap manajemen laba, perusahaan akan melakukan pengelolaan labanya (*Earning Management*) untuk meyakinkan para calon investor. Dari uraian tersebut maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Hakim dan Praptoyo (2015), Rice (2013), Suhartanto (2015), Fatmawati dan Djajanti (2012)

D. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

Menurut Wibowo (2015), pengertian Aset Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Assets*) adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya :

- a. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*).
- b. Akumulasi sisa kerugian yang belum dikompensasikan.
- c. Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan

Penilaian kembali Aset Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Assets*) harus dilakukan setiap tanggal neraca, terkait dengan kemungkinan dapat atau tidaknya pemulihan aset pajak tangguhan (*Deferred Tax Assets*) direalisasikan dalam periode mendatang.

Akibat dari adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan akan menimbulkan terjadinya aset pajak tangguhan. Dalam hal ini, akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasikan merupakan pengurang laba sedangkan akumulasi kredit pajak yang belum dimanfaatkan merupakan pengurang pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan pada periode pajak oleh perusahaan (Suranggane, 2007).

Kaitannya aset pajak tangguhan dapat dijadikan dalam melakukan praktik manajemen laba, menurut Hakim dan Praptoyo (2015) bahwa aset

pajak tangguhan yang jumlahnya diperbesar dapat menurunkan laba perusahaan karena akibat adanya kompensasi rugi yang masih belum dikompensasikan dan kredit pajak yang belum dimanfaatkan pada perusahaan. Aset pajak tangguhan yang jumlahnya diperbesar manajemen dimotivasi adanya pemberian bonus, beban politis atas besarnya perusahaan dan meminimalisasi pembayaran pajak agar tidak merugikan perusahaan. Mengacu pada pernyataan tersebut, maka diekspetasikan adanya peranan antara aset pajak tangguhan yang akan dimungkinkan dapat digunakan sebagai indikator adanya manajemen laba.

Dari uraian di atas, pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Timuriana dan Muhamad (2015) yang meneliti perusahaan manufaktur untuk mengetahui pengaruh aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada tahun 2010-2014 pada Bursa Efek Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Pernyataan sejenis ditemukan dalam penelitian Hakim dan Praptoyo (2015), Purba (2016), dan Fondalis (2013) yang menyatakan bahwa aset pajak tangguhan mempunyai pengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Aset pajak tangguhan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba.

2. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

Menurut Wibowo (2015), pengertian Beban Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Expense*) adalah Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang untuk periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*).

Perbedaan temporer timbul sebagai konsekuensi logis dari adanya perbedaan standar atau ketentuan yang berkaitan dengan pengakuan (kriteria dan periode), dan pengukuran atau penilaian elemen-elemen laporan keuangan yang berlaku dalam disiplin akuntansi perpajakan (ketentuan perpajakan) disatu pihak dengan standar atau ketentuan yang berlaku dalam disiplin akuntansi keuangan dipihak yang lain.

Semakin besar persentase beban pajak tangguhan terhadap total beban pajak perusahaan menunjukkan standar akuntansi yang semakin liberal (Yulianti, 2004). Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal memiliki hubungan dengan insentif pelaporan keuangan seperti *financial distress* dan pemberian bonus, dengan adanya hal tersebut maka dimungkinkan manajer dapat melakukan rekayasa laba atau manajemen laba dengan memperbesar atau memperkecil jumlah beban pajak tangguhan yang diakui dengan laporan laba rugi. Selisih positif antara laba akuntansi dan laba fiskal mengakibatkan terjadinya koreksi positif yang menimbulkan terjadinya beban pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan yang besar akan menurunkan tingkat laba yang diperoleh suatu perusahaan (Djamaludin, 2008 dalam Anasta, 2015).

Beban pajak tangguhan berpengaruh negatif artinya setiap kenaikan beban pajak tangguhan, maka probabilitas perusahaan dalam melakukan manajemen laba juga akan mengalami peningkatan dengan cara menurunkan laba. Biasanya perusahaan akan melakukan praktik manajemen laba dengan memanipulasi laporan keuangannya dengan cara menaikkan jumlah beban pajak tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi sehingga tingkat laba yang diperoleh akan lebih kecil (Herdawati, 2013).

Dari uraian di atas, pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Anasta (2015) dan Herdawati (2013) yang menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sari (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂: Beban pajak tangguhan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba

3. Pengaruh *Leverage* Terhadap Manajemen Laba

Leverage merupakan perbandingan antara total hutang dengan total aset perusahaan. Rasio ini merupakan pengukur bagi perusahaan atas aset yang dibiayai dengan hutang. *Leverage* mempunyai hubungan dengan praktik manajemen laba, ketika perusahaan mempunyai rasio *leverage*

yang tinggi maka perusahaan cenderung akan melakukan praktik manajemen laba karena perusahaan terancam tidak bisa memenuhi kewajibannya dengan membayar hutangnya tepat waktu (Yamaditya, 2014).

Hal ini dijelaskan dalam teori keagenan, semakin dekat perusahaan dengan pelanggaran perjanjian hutang yang berbasis akuntansi, lebih memungkinkan manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang memindahkan laba yang dilaporkan dari periode masa mendatang ke periode saat ini, hal tersebut dilakukan karena laba bersih yang dilaporkan naik akan mengurangi kemungkinan kegagalan membayar hutang-hutangnya pada masa mendatang (Watts and Zimmerman, 1986 dalam Rice, 2013).

Dari uraian di atas, pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian Wardani, dkk (2013) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen laba, begitu juga sepaham dengan hasil penelitian Agustia (2013) yang menyatakan bahwa *leverage* mempunyai hubungan positif dengan praktik manajemen laba, investor akan melihat rasio *leverage* perusahaan yang terkecil, karena semakin kecil rasio *leverage* perusahaan atau semakin kecil modal yang dibiayai oleh hutang maka perusahaan mempunyai resiko yang kecil juga, begitu juga sebaliknya. Dengan kondisi tersebut dapat dijadikan oleh manajer untuk melakukan praktik manajemen laba dengan memanipulasi laporan keuangannya. Yatulhusna (2015) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃ : Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan (*size*) Terhadap Manajemen Laba

Ukuran perusahaan dapat menunjukkan bagaimana keadaan perusahaan tersebut apakah tergolong perusahaan yang mempunyai kinerja yang bagus dengan pengalaman dan perkembangannya atau bahkan sebaliknya. Sehingga dapat mengetahui kemampuan perusahaan dan tingkat risiko dalam mengelola investasi yang diberikan pada pemegang saham (Yamaditya, 2014).

Ukuran perusahaan mempunyai hubungan dengan praktik manajemen laba, Moses (1997) dalam Muliati (2011) mengemukakan bahwa perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki dorongan yang lebih besar untuk melakukan perataan laba (salah satu bentuk manajemen laba) dibandingkan dengan perusahaan kecil, karena memiliki biaya politik lebih besar. Biaya politik muncul dikarenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian media dan konsumen. Perusahaan besar seringkali menjadi perhatian banyak pihak investor sehingga seringkali mendapatkan tuntutan untuk memiliki informasi laba yang lebih baik. Tuntutan tersebut seringkali menjadikan manajemen berusaha untuk melaporkan laba lebih tinggi, dengan begitu maka manajemen melakukan

tindakan manajemen laba untuk memanipulasi labanya agar menarik investor.

Dari uraian di atas, pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Halim (2005), Azlina (2010) dan Muliati (2011) menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempunyai hubungan positif dengan praktik manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Yamaditya (2014), Pangesti (2011) dan Purnamasari *et al.* (2014) juga menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₄ : Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba